

BAB IV

PENUTUP

Brexit merupakan *out put* dari sekuritisasi isu imigran yang dilakukan oleh pemerintah Inggris. Sekuritisasi tersebut dilanjutkan dengan pembuatan kebijakan imigrasi baru dalam *New Plan for Immigration*. Sekuritisasi harus diakhiri dengan desekuritisasi agar tidak menimbulkan kepanikan yang berlebih dalam masyarakat. Pemerintah Inggris menggunakan Skema *Homes for Ukraine* di bawah *New Plan for Immigration* sebagai salah satu bentuk upaya desekuritisasi isu imigran yang dilakukan oleh pemerintah Inggris di mana skema *Homes for Ukraine*. Skema *Homes for Ukraine* adalah tahap *Change Through Stabilization* yang memperlihatkan pengurangan ketegangan isu. Setelah itu, pemerintah Inggris melakukan *Replacement* melalui perubahan orientasi kebijakan imigrasi yang dilakukan oleh pemerintah Inggris bukan lagi dalam rangka sekuritisasi, namun dalam rangka perbaikan ekonomi. Kemudian, upaya *Rearticulation* ditunjukkan dengan diangkatnya Rishi Sunak sebagai Perdana Menteri Inggris yang latar belakangnya adalah imigran yang menunjukkan bagaimana pemerintah Inggris mempertegas keberadaan imigran di Inggris bukanlah sebuah ancaman. Pemerintah Inggris belum mencapai tahap *Silencing* yang sempurna dalam upaya desekuritisasi isu imigran pasca-Brexit dikarenakan masih terdapat pergerakan kelompok masyarakat yang menyuarakan anti-imigran sehingga penulis mengasumsikan bahwa upaya desekuritisasi isu imigran pemerintah Inggris pasca-Brexit masih dalam tahap proses yang belum selesai.

Tahap-tahap dari proses desekuritisasi isu imigran di Inggris dapat berjalan sendiri-sendiri atau tidak dalam urutan yang paten, namun tahap yang paling penting dan paling berpengaruh dalam upaya desekuritisasi isu imigran di Inggris pasca-Brexit adalah tahap *Change Through Sytabilization* melalui *Homes for Ukraine Scheme 2022* yang mengambil tindakan penerimaan pencari suaka dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Terlepas dari itu, proses desekuritisasi isu imigran yang dilakukan oleh pemerintah Inggris masih belum pada tahap yang sempurna. Hal tersebut dikarenakan proses *Silencing* yang masih belum berjalan secara utuh. Dengan kata lain proses *Silencing* hanya dilakukan dalam intensitas yang sedikit atau jarang. Selain itu, masih terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang belum menerima desekuritisasi isu imigran yang disampaikan oleh aktor-aktor sekuritisasi. Dengan kata lain, masih terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang menganggap bahwa imigran adalah ancaman bagi kedaulatan nasional Inggris. Selain itu, situasi internal Inggris yang

masih belum stabil menghadapi status barunya sebagai negara yang terlepas dari keanggotaan Uni Eropa juga mempengaruhi prioritas kebijakan pemerintah Inggris yang harus memperbaiki perekonomiannya. Ditambah lagi kondisi eksternal yang juga fluktuatif dan tidak dapat ditebak membuat pemerintah Inggris harus siap dalam merespon segala situasi.

Pemerintah Inggris dapat mengambil langkah untuk mempercepat proses penstabilan ekonominya pasca-Brexit sehingga dapat memaksimalkan proses-proses yang lain. Dalam hal ini, saran dari penulis adalah pemerintah Inggris perlu memperbanyak kerja sama ekonomi bilateral dengan negara lain sebagai upaya meningkatkan perekonomian Inggris pasca keluar dari Uni Eropa. selain itu, pemerintah Inggris juga perlu melakukan langkah kongkret untuk menekan persebaran kelompok ekstremis sayap kanan yang menghambat proses desekuritisasi isu imigran di Inggris mencapai tahap *Silencing*. Pada akhirnya, Brexit adalah keputusan yang penuh risiko bagi pemerintah Inggris. Perubahan yang terjadi menimbulkan banyak ketidakstabilan sehingga pemerintah Inggris harus selalu menyusun strategi untuk masa depan Inggris. Penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan sumber data primer agar data lebih detail dan konkret.

